



## Analisis Potensi Ekonomi Dan Kependudukan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

### *Analysis Of Potential Economic And Population In Economic Growth In Mamuju Regency, West Sulawesi Province*

**Tityas Margawati<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Diponegoro, Fakultas Teknik, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Jl. Prof Sudarto, SH, Tembalang, Semarang  
Email: [tityasmargawati@yahoo.com](mailto:tityasmargawati@yahoo.com)

#### Article Info

##### Article history:

Received: 18 Oktober 2022

Accepted: 20 November 2022

Published: 20 Desember 2022

##### Keywords:

*Economic Potential; Sector basis; Population; LQ; Shift Share*

DOI: 10.37859/jae.v12i2.4193

JEL Classification: O1, O4

#### Abstrak

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah diperlukan penilaian terhadap sektor ekonomi yang dimiliki yang mengalami kemajuan tiap tahunnya. Tujuan penelitian ekonomi kependudukan di Mamuju ini adalah untuk mengidentifikasi potensi dan melihat kecenderungan pertumbuhan di setiap sektor ekonomi di Mamuju. Metode yang digunakan adalah analisis *Location Quotients* (LQ) dan *Shift Share*. Sektor ekonomi tersebut dikaitkan dengan dinamika kependudukan untuk melihat hubungan antara ekonomi wilayah dan dinamika penduduk di Mamuju sebagai bahan penentuan strategi perencanaan pembangunan di sektor ekonomi. Dari 17 sektor yang ada terdapat 13 sektor yang merupakan sektor basis dan mengalami kemajuan dalam memberi kontribusi terhadap nilai PDRB. Dari hasil tersebut dan didukung dengan dinamika jumlah penduduk yang semakin meningkat, Kabupaten Mamuju perlu meningkatkan kontribusi sektor tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk didalam dan diluar Kabupaten Mamuju.

*To increase the rate of economic growth of a region, it is necessary to assess the economic sector owned which is progressing every year. The purpose of this research on population economics in Mamuju is to identify potentials and see growth trends in each economic sector in Mamuju. The method used is analysis of Location Quotients (LQ) and Shift Share. The economic sector is linked to population dynamics to see the relationship between regional economy and population dynamics in Mamuju as a material for determining development planning strategies in the economic sector. Of the 17 existing sectors, there are 13 sectors which are the base sector and are progressing in contributing to the value of PDRB. From these results and supported by the dynamics of the increasing population, Mamuju Regency needs to increase the contribution of the sector to meet the needs of residents inside and outside Mamuju Regency.*

## PENDAHULUAN

Menurut Hartono (2008), pembangunan pada dasarnya merupakan suatu upaya yang dilakukan secara berkesinambungan demi mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dengan perencanaan dan penyusunan program melalui pendekatan wilayah maupun sektoral. Pendekatan sektoral dalam upaya pengembangan daerah dapat dilakukan sesuai dengan prioritas daerah masing-masing supaya lebih optimal dengan tetap memperhatikan dampak yang dapat timbul dari pembangunan tersebut. Faturrahman (2017) memaparkan pendapat Tarigan (2012) mengenai pembangunan daerah melalui pendekatan sektoral dapat dilakukan dengan melihat potensi dan peluang dari sektor tertentu dengan mengelompokkannya kedalam kegiatan ekonomi yang serupa dan kemudian dikembangkan di setiap sektor tersebut.

Salah satu sektor pembangunan daerah yaitu pembangunan ekonomi. Kegiatan pembangunan ekonomi daerah dilaksanakan dengan pengelolaan sumber daya melalui kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta dengan menciptakan lapangan kerja baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah harus memperhitungkan dan memperkirakan potensi sumber daya yang ada dalam rangka menghitung kebutuhan yang diperlukan (Arsyad, 1999 dalam Almulaibari, 2011). Sehingga dalam perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan potensi yang ada di wilayahnya baik potensi ekonomi maupun potensi kependudukannya.

Potensi ekonomi daerah merupakan kemampuan ekonomi yang dimiliki suatu daerah yang dapat menjadi sumber kehidupan dan sumber ekonomi bagi masyarakat lokal maupun wilayah lain yang dapat dikembangkan secara berkesinambungan (Soeparmoko, 2002 dalam Mangun 2007). Sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah perlu melihat sektor ekonomi yang memiliki potensi lebih dari wilayah tersebut yang dapat menjadi sektor basis untuk lebih dikembangkan. Selain itu menurut Sukirno (1994) faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah antara lain tanah dan kekayaan alam, jumlah penduduk dan mutu tenaga kerja, barang modal dan teknologi, sistem sosial masyarakat, dan luas pasar.

Penelitian terkait analisis potensi ekonomi sudah cukup banyak dilakukan salah satunya oleh Mangun (2017) yang melakukan analisis terhadap sektor unggulan di tiap kabupaten serta kinerja setiap sektor untuk menentukan sektor prioritas dalam pengembangan pembangunan. Sedangkan Prishardoyo (2008) juga menilai sektor ekonomi yang menjadi basis pertumbuhan ekonomi dan keterkaitan dengan daerah sekitar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing. Penelitian tersebut menganalisis pertumbuhan ekonomi daerah dengan menilai sektor ekonomi yang ada di wilayah tersebut, sedangkan penelitian ini juga memandang aspek dan peran kependudukan dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Kabupaten Mamuju merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Barat sejak tahun 2004 yang merupakan provinsi pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai ibukota provinsi baru, kegiatan pembangunan di Mamuju dilaksanakan di berbagai sektor dan pusat-pusat pelayanan, salah satunya yaitu dengan pembangunan kompleks perkantoran provinsi yang menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan data BPS, dari tahun 2002 sampai 2004 rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk di Mamuju antara tiga sampai empat persen pertahun, sedangkan pada tahun 2005 terjadi pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup signifikan mencapai 7,35% dalam setahun.

Jumlah penduduk yang semakin meningkat tersebut kemudian diikuti dengan semakin meningkat pula kegiatan ekonomi di Mamuju. Pembangunan perumahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kantor jasa, dan transportasi semakin berkembang. Semakin ramainya penduduk di Mamuju membawa dampak pada semakin ramai pula aktivitas ekonominya. Salah satu contohnya yaitu beroperasinya Bandara Tampa Padang untuk penerbangan komersil pada tahun 2007 memberi kontribusi pada semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Mamuju pada sektor transportasi mencapai 22,46% pada tahun 2007.

Sektor perekonomian merupakan salah satu sektor utama dalam pembangunan wilayah di Mamuju. Dari aktivitas ekonomi tersebut, pada tahun 2016 - 2018 tercatat nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menunjukkan peningkatan. Namun laju pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun dapat mengalami percepatan maupun perlambatan. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi diperlukan penilaian terhadap sektor- sektor yang mendukung perekonomian di Mamuju untuk mengetahui nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan terhadap wilayah lain. Penilaian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi basis yang mempunyai potensi sebagai sektor unggulan di Mamuju serta untuk melihat prospek di masa yang akan datang. Penduduk sebagai pelaku dalam kegiatan ekonomi mempunyai hubungan erat dengan pembangunan perekonomian. Sehingga faktor kependudukan memberikan pengaruh terhadap maju dan mundurnya suatu sektor perekonomian.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengetahui potensi ekonomi di Mamuju dan melihat kecenderungan pertumbuhan setiap sektor yang ada. Lalu dari potensi ekonomi tersebut dikaitkan dengan dinamika kependudukan untuk melihat hubungan antara ekonomi wilayah dan dinamika penduduk di Mamuju. Dengan mengetahui potensi ekonomi dan kependudukan maka dapat menjadi bahan evaluasi maupun masukan dalam penyusunan strategi pengembangan ekonomi di Mamuju.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis LQ, *Shift Share*, dan Analisis Kependudukan. Analisis *LQ dan Shift Share* biasa digunakan untuk menganalisis aspek ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana dalam penelitian Hidayati (2015) yang menggunakan analisis LQ dan *Shift Share* untuk menilai kesenjangan wilayah berdasarkan indikator ekonomi dengan melihat jumlah sektor basis dan sektor progresif di wilayah tersebut. Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, analisis LQ dilakukan dengan membandingkan besarnya kontribusi suatu sektor terhadap pembentukan PDRB suatu daerah di tingkat lokal terhadap PDRB ditingkat regional. Analisis LQ digunakan untuk menganalisis sektor basis maupun non basis yang merupakan potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Secara matematis dapat ditulis dengan persamaan:

$$LQ = \frac{ps/pl}{Ps/Pl}$$

Dimana LQ adalah *Location Quotients*, ps dan pl adalah nilai produksi atau kesempatan kerja di wilayah lokal per sektor dan keseluruhan sektor, Ps dan Pl adalah nilai produksi atau kesempatan kerja dalam tingkat regional per sektor dan keseluruhan sektor. Dengan kriteria apabila nilai LQ lebih besar dari 1 maka sektor tersebut termasuk dalam sektor basis, sedangkan jika nilai LQ kurang dari 1 maka sektor tersebut termasuk dalam sektor non-basis.

Kedua, untuk mengetahui perubahan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut pada kurun waktu lebih dari satu tahun seperti kegiatan produksi maupun ketersediaan kesempatan kerja menggunakan analisis *Shift Share*. Tujuan analisis *shift share* yaitu untuk melihat tingkat perkembangan suatu sektor dibandingkan dengan sektor lain di suatu wilayah secara relatif. Perkembangan tersebut diwujudkan dalam bentuk percepatan atau perlambatan. Tiga komponen yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah antara lain KPN, KPP, dan KPPW. Perhitungan matematis dalam analisis *Shift Share* adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} PE &= KPN + KPP + KPPW \\ &= (Yt/Yo - 1) + (Yit / Yio - Yt/Yo) + (yit / yio - Yt/Yo) \\ &= [Ra - 1] + [Ri - Ra] + [ri - Ra] \end{aligned}$$

Komponen Pertumbuhan Nasional (KPN) dihitung berdasarkan indikator ekonomi di tingkat Nasional di akhir dan di tahun analisis yang disimbolkan dengan Yt dan Yo. Komponen

Pertumbuhan Proporsional (KPP) dihitung berdasarkan indikator ekonomi di tingkat Nasional yang di analisis di akhir tahun dan awal tahun pada salah satu sektor yang disimbolkan dengan Yit dan Yio, sedangkan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPPW) merupakan indikator ekonomi lokal pada suatu sektor yang dihitung di akhir tahun dan awal tahun analisis disimbolkan dengan yit dan yio. Penilaian hasil dari analisis *Shift Share* disimbolkan dengan PS yang merupakan penjumlahan dari nilai KPP dan KPPW dengan ketentuan jika nilai PS lebih besar atau sama dengan 0 maka sektor tersebut mengalami kemajuan, sedangkan jika nilai PS lebih kecil dari 0 maka dapat dikatakan sektor tersebut mengalami kemunduran.

Terakhir, analisis kependudukan dilakukan dengan pendekatan makro/agregat untuk melihat tren pertumbuhan penduduk dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, usia, angkatan kerja, dan distribusi penduduk dalam lapangan usaha dalam kurun waktu tertentu untuk melihat hubungan antara kondisi kependudukan terhadap potensi ekonomi wilayah. Hubungan tersebut difokuskan pada kondisi kependudukan suatu wilayah terhadap nilai PDRB menurut lapangan usaha berkaitan dengan pemenuhan tenaga kerja yang mensupport sektor perekonomian.

Data yang digunakan untuk analisis LQ, *Shift Share*, dan analisis kependudukan diperoleh dari pengumpulan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. Data yang dikumpulkan berupa Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju dan PDRB Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2015 – 2019 berdasarkan harga konstan, dan data kependudukan selama lima tahun terakhir yaitu mulai tahun 2015 – 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat sektor basis dan non basis di Kabupaten Mamuju, dilakukan perhitungan terhadap nilai PDRB Kabupaten Mamuju dan PDRB Provinsi Sulawesi Barat menurut lapangan usaha mulai tahun 2015 – 2019 (lima tahun) berdasarkan harga konstan. Harga konstan yang digunakan adalah harga konstan pada tahun 2010. Hasil perhitungan LQ dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1: Hasil Analisis LQ Kabupaten Mamuju Tahun 2015 – 2019**

No	Sektor	LQ per Tahun					LQ Rata-Rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,856	0,849	0,856	0,857	0,842	0,852
2	Pertambangan dan Penggalian	1,522	1,483	1,499	1,510	1,539	1,510
3	Industri Pengolahan	0,323	0,335	0,335	0,333	0,336	0,332
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,283	1,307	1,285	1,297	1,270	1,288
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,189	2,273	2,249	2,247	2,291	2,250
6	Konstruksi	1,321	1,285	1,270	1,274	1,293	1,289
7	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,012	0,983	0,977	0,980	0,992	0,989
8	Transportasi dan Pergudangan	1,331	1,425	1,463	1,455	1,405	1,416
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,153	1,125	1,110	1,134	1,164	1,137
10	Informasi dan Komunikasi	1,702	1,685	1,674	1,687	1,609	1,672
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,373	1,257	1,273	1,290	1,218	1,282
12	Real Estate	0,832	0,811	0,814	0,821	0,835	0,823
13	Jasa Perusahaan	1,254	1,217	1,209	1,220	1,238	1,228
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,490	1,474	1,473	1,449	1,493	1,476
15	Jasa Pendidikan	1,059	1,038	1,029	1,030	1,039	1,039
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,009	1,011	1,005	1,006	1,014	1,009

17	Jasa Lainnya	1,536	1,498	1,501	1,505	1,514	1,511
----	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Source: Pengolahan Data, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan LQ pada tabel 1, dari 17 sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Mamuju, terdapat 13 (tiga belas) sektor dengan nilai LQ rata-rata  $> 1$  dan empat sektor dengan nilai LQ rata-rata  $< 1$ . Sektor ekonomi dengan nilai LQ lebih besar dari 1 dapat diartikan kalau sektor tersebut tergolong kedalam sektor ekonomi basis di Kabupaten Mamuju dimana sektor tersebut surplus atau dapat memenuhi permintaan pasar dan kebutuhan dalam wilayah lokal dan juga dapat dikirim ke luar wilayah. Berdasarkan nilai LQ tersebut, sektor basis dan non basis di Kabupaten Mamuju diperoleh hasil sebagaimana tabel 2 berikut.

**Tabel 2: Jenis Sektor Basis dan Non Basis Kabupaten Mamuju Tahun 2015 – 2019**

No	Jenis Sektor	Sektor Ekonomi	Nilai LQ
1	Sektor Basis	Pertambangan dan Pengegalian	1,510
		Pengadaan Listrik dan Gas	1,288
		Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,250
		Konstruksi	1,289
		Transportasi dan Pergudangan	1,416
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,137
		Informasi dan Komunikasi	1,672
		Jasa Keuangan dan Asuransi	1,282
		Jasa Perusahaan	1,228
		Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,416
		Jasa Pendidikan	1,039
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,009
		Jasa Lainnya	1,511
2	Sektor Non Basis	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,852
		Industri Pengolahan	0,332
		Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,989
		Real Estate	0,823

Source: Pengolahan Data, 2021

Sektor basis yang memberikan kontribusi terbesar dalam laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju yaitu dari sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang dengan nilai LQ 2,250, kemudian sektor Informasi dan Komunikasi dengan nilai LQ 1,672, dan sektor Pertambangan dan Pengegalian dengan nilai LQ 1,510.

Hasil analisis *Shift Share* diperoleh nilai KPN, KPP, dan KPPW dan PS. Komponen Pertumbuhan Nasional atau KPN merupakan nilai perubahan jumlah produksi maupun jumlah kesempatan kerja di suatu daerah yang terjadi karena adanya perubahan jumlah produksi atau jumlah kesempatan kerja secara umum. KPN juga sering disebut sebagai *national share* yang berupa kebijakan ekonomi nasional maupun kebijakan lain yang dapat berpengaruh terhadap sektor perekonomian dalam suatu wilayah. Komponen Pertumbuhan Proporsional atau KPP merupakan nilai deviasi dari nilai KPN dalam pertumbuhan suatu wilayah. Apabila nilai KPP lebih besar dari 0, maka sektor yang berspesialisasi dalam wilayah tersebut tumbuh dengan cepat secara nasional, sedangkan jika KPP bernilai negatif atau kurang dari 0, maka sektor yang berspesialisasi dalam wilayah tersebut tumbuh dengan lambat secara nasional. KPP ini sering disebut dengan komponen *proportional shift*.

Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah atau KPPW, merupakan komponen untuk menilai keunggulan suatu sektor secara regional atau sering disebut dengan *differential shift*.

Apabila nilai KPPW lebih besar dari 0, maka sektor tersebut secara komparatif lebih unggul dan lebih menguntungkan dalam regional wilayah tersebut, jika KPPW bernilai negatif atau kurang dari 0 maka sektor tersebut tidak mempunyai keunggulan maupun keuntungan dalam regional wilayah tersebut. Sedangkan PS merupakan nilai yang diperoleh dari penjumlahan nilai KPP dan KPPW dengan ketentuan jika  $PS \geq 0$  maka dapat dikatakan sektor tersebut mengalami kemajuan, sedangkan jika  $PS < 0$  maka dapat dikatakan sektor tersebut mengalami kemunduran.

Analisis *Shift Share* dilakukan berdasarkan nilai PDRB Kabupaten Mamuju dan PDRB Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan harga konstan pada awal tahun analisis yaitu tahun 2015 dan akhir tahun analisis yaitu tahun 2019. Hasil perhitungan *Shift Share* diperoleh hasil sebagaimana tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Mamuju Tahun 2015 – 2019**

No	Sektor	KPN	KPP	KPPW	PS
		Ra-1	Ri-Ra	ri-Ra	PP + PPW
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,266	-0,036	-0,031	-0,066
2	Pertambangan dan Penggalian	0,266	0,078	0,121	0,199
3	Industri Pengolahan	0,266	-0,077	-0,004	-0,081
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,266	0,256	0,272	0,528
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,266	0,128	0,224	0,352
6	Konstruksi	0,266	0,054	0,052	0,107
7	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,266	-0,029	-0,029	-0,059
8	Transportasi dan Pergudangan	0,266	-0,034	0,062	0,028
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,266	0,048	0,088	0,137
10	Informasi dan Komunikasi	0,266	0,192	0,141	0,333
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,266	0,083	-0,045	0,039
12	Real Estate	0,266	-0,002	0,028	0,026
13	Jasa Perusahaan	0,266	-0,045	-0,036	-0,081
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,266	0,039	0,069	0,108
15	Jasa Pendidikan	0,266	0,062	0,064	0,126
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,266	0,063	0,098	0,161
17	Jasa Lainnya	0,266	0,112	0,120	0,232

Source: Pengolahan Data, 2021

Berdasarkan tabel 3 tersebut dapat diperoleh hasil yaitu sektor yang memiliki spesialisasi dan tumbuh dengan cepat yang memiliki nilai KPP > 0 ada sebelas sektor yaitu sektor nomor 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, dan 17 dengan nilai tertinggi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Sedangkan sektor yang memiliki spesialisasi pada sektor yang tumbuh lambat dengan nilai KPP < 0 ada enam sektor yaitu sektor nomor 1, 3, 7, 8, 12, dan 13 dengan nilai KPP paling kecil pada sektor Industri Pengolahan.

Sektor yang mempunyai keunggulan komparatif/keuntungan lokasional dengan nilai KPPW > 0 ada 12 sektor yaitu sektor nomor 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan 17 dengan nilai KPPW tertinggi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Sedangkan sektor yang tidak mempunyai keunggulan komparatif/keuntungan lokasional dengan nilai KPPW < 0 ada lima sektor yaitu sektor nomor 1, 3, 7, 11, dan 13 dengan nilai terkecil pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi.

Sektor yang mengalami kemajuan dengan nilai  $PS \geq 0$  ada 13 sektor yaitu sektor nomor 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, dan 17 dengan nilai PS tertinggi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Sedangkan sektor yang mengalami kemunduran dengan nilai  $PS < 0$  ada empat sektor yaitu sektor nomor 1, 3, 7, dan 13 dengan nilai PS paling kecil pada sektor Industri Pengolahan dan Jasa Perusahaan.

Untuk menggambarkan potensi ekonomi di Kabupaten Mamuju berdasarkan hasil analisis sektor yang potensial berdasarkan analisis LQ dan *Shift Share* direkap pada tabel 4 berikut.

**Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Analisis LQ dan *Shift Share* Kabupaten Mamuju Tahun 2015 – 2019**

No	Sektor	LQ	Shift Share		
		Sektor Basis	KPP	KPPW	PS
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan				
2	Pertambangan dan Penggalian	✓	✓	✓	✓
3	Industri Pengolahan				
4	Pengadaan Listrik dan Gas	✓	✓	✓	✓
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	✓	✓	✓	✓
6	Konstruksi	✓	✓	✓	✓
7	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor				
8	Transportasi dan Pergudangan	✓		✓	✓
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	✓	✓	✓	✓
10	Informasi dan Komunikasi	✓	✓	✓	✓
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	✓	✓		✓
12	Real Estate			✓	✓
13	Jasa Perusahaan	✓			
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	✓	✓	✓	✓
15	Jasa Pendidikan	✓	✓	✓	✓
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	✓	✓	✓	✓
17	Jasa Lainnya	✓	✓	✓	✓

Source: Pengolahan Data, 2021

Berdasarkan tabel diatas dari 13 sektor basis di Kabupaten Mamuju terdapat 12 sektor yang mengalami kemajuan dalam rentang waktu tahun 2005 – 2019, dan terdapat satu sektor basis yang mengalami kemunduran yaitu sektor Jasa Perusahaan. Terdapat 10 sektor basis yang mempunyai spesialisasi tumbuh cepat, keunggulan komparatif/keuntungan lokasional, serta mengalami kemajuan dalam waktu lima tahun terakhir yaitu sektor nomor 2, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, dan 17.

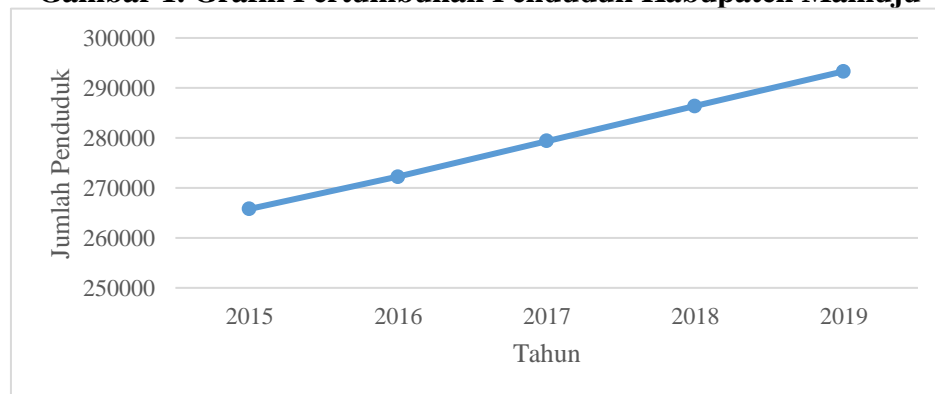
Sebagai ibukota provinsi baru yang sedang bertumbuh 10 sektor basis tersebut merupakan potensi ekonomi yang memberi sumbangan dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju melalui peningkatan PDRB. Sektor Tambang dan Galian semakin dapat dieksplorasi seiring dengan semakin terbukanya lahan dan akses transportasi, namun dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjaga keberlanjutannya. Sektor listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah daur ulang, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa pendidikan dan kesehatan serta jasa lainnya juga sangat berpotensi untuk meningkatkan angka PDRB sebagai bentuk fasilitas seiring semakin bertambahnya jumlah penduduk. Konstruksi, informasi dan komunikasi, dan

pelayanan pemerintahan juga berpotensi memberi pengaruh terhadap penerimaan ekonomi daerah dan perkembangan wilayah dengan memperluas hubungan dengan wilayah lain.

### Analisis Kependudukan

Jumlah penduduk pada tahun 2019 di Kabupaten Mamuju tercatat sejumlah 293.326 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 148.981 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 144.345 jiwa dengan *sex ratio* sebesar 103,21 yaitu perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan dimana setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 sampai 104 penduduk laki-laki. Dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju terus mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2018 – 2019 sebesar 2,42%, sedangkan jika dihitung dalam waktu lima tahun terakhir sebesar 10,36%. Jumlah pertumbuhan penduduk Kabupaten Mamuju dari tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada gambar 1 berikut.

**Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mamuju**

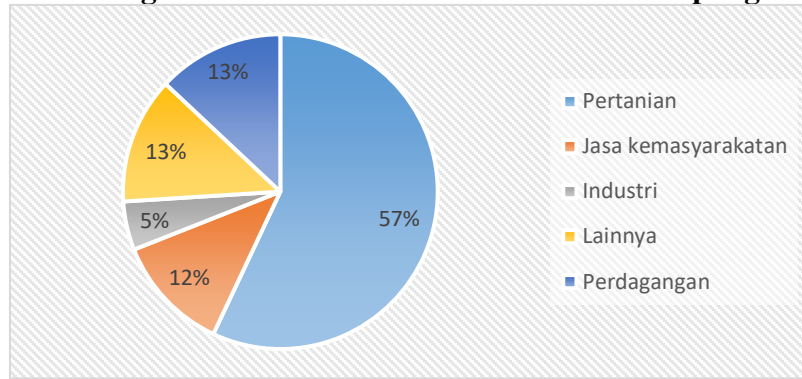


Source: Pengolahan Data, 2021

Dari grafik gambar 1 diatas dapat diketahui laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mamuju rata-rata sebesar 2,07% per tahun. Hal tersebut dimungkinkan karena aktivitas ekonomi yang semakin meningkat di Kabupaten Mamuju sebagai ibukota provinsi baru. Pertumbuhan penduduk tersebut tidak hanya disebabkan dari angka kelahiran namun juga disebabkan adanya migrasi penduduk yang masuk ke wilayah Kabupaten Mamuju.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir penduduk dalam usia produktif yang dikelompokkan berdasarkan usia semakin meningkat jumlahnya. Tahun 2016 diperoleh data jumlah penduduk usia produktif sebesar 64,97% dan pada tahun 2017 jumlah tersebut meningkat sebesar 0,21% menjadi 65,18%, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan lagi pada angka 65,33%, namun di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 64,75%. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk usia produktif dari tahun ke tahun tersebut menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang dapat di berdayakan di sektor ekonomi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun pada tahun 2019 persentasenya menurun karena terjadinya peningkatan angka beban tanggungan di Mamuju.

Pada tahun 2019, total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) mencapai lebih dari setengah penduduk Kabupaten Mamuju. Angkatan kerja yang terdapat di Kabupaten Mamuju sebanyak 134.460 orang dan sebanyak 97,33% sudah terserap oleh lapangan kerja sehingga tingkat pengangguran relatif kecil sebesar 2,66%. Persentase penduduk menurut lapangan usaha terdistribusi dalam beberapa sektor mayoritas, yaitu sektor pertanian sebesar 57%, sektor industri 5%, sektor perdagangan 13%, sektor jasa kemasyarakatan 12%, dan lainnya 13% sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2 berikut.

**Gambar 2. Diagram Persentase Penduduk Menurut Lapangan Usaha**

Source: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2020

Berdasarkan data penduduk diatas, angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mamuju dari tahun 2015 – 2019 semakin meningkat dengan jumlah penduduk usia kerja cukup tinggi di tahun 2019 mencapai 64,75%, dan sebanyak 97,33% angkatan kerja tersebut sudah terserap oleh lapangan usaha. Pertumbuhan penduduk tersebut juga diiringi dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di Kabupaten Mamuju sebagai ibukota provinsi baru dilihat dari peningkatan PDRB dari tahun ke tahun.

Persentase penduduk berdasarkan lapangan usaha menunjukkan sebagian angkatan kerja bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 57%. Namun sektor pertanian di Kabupaten Mamuju merupakan sektor non basis dan cenderung mengalami kemunduran dari tahun ke tahun. Hal tersebut mengindikasikan perlu dikembangkannya sektor pertanian untuk meningkatkan kontribusinya dalam pendapatan daerah, misalnya dengan meningkatkan teknologi pertanian untuk menambah produksi. Menurut Sukirno (1994) kekayaan alam merupakan modal pembangunan pada fase permulaan proses pertumbuhan ekonomi sehingga sektor pertanian perlu menjadi perhatian untuk digali potensinya. Selain itu persentase penduduk berdasarkan lapangan kerja cukup banyak di sektor industri dan perdangan dengan nilai 5% dan 13%. Namun sektor industri dan perdagangan juga bukan merupakan sektor basis dan kontribusinya terhadap PDRB cenderung mengalami kemunduran dari tahun ke tahun. Sukirno (1994) juga memaparkan bahwa menurut Adam Smith pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh luasnya pasar, sehingga untuk sektor industri dan perdagangan tersebut perlu didukung oleh teknologi informasi dan transportasi untuk memperluas pasar.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh 13 sektor yang mempunyai potensi ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi dan merupakan sektor basis yang mengalami surplus dan terdapat 13 sektor yang mengalami kemajuan dalam kurun waktu lima tahun terakhir baik sektor basis maupun non basis. Dari ketiga belas sektor tersebut, sepuluh diantaranya mempunyai spesialisasi tumbuh cepat, keunggulan komparatif/keuntungan lokasional, serta mengalami kemajuan dalam waktu lima tahun terakhir yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya.

Aspek kependudukan juga memberi kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju. Bertambahnya jumlah penduduk memberi stimulasi untuk berkembangnya pembangunan baik di bidang infrastruktur, jasa, dan pemerintahan. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk juga memberi dampak pada jumlah tenaga kerja yang mendukung sektor-sektor ekonomi untuk dapat berjalan dengan baik. Namun untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan kependudukan perlu peningkatan kualitas dan mutu

tenaga kerja serta teknologi supaya potensi ekonomi seperti pertanian, industri, dan perdagangan dapat lebih optimal.

## SARAN

Berdasarkan pembahasan dan simpulan diatas diperlukan upaya perencanaan pembangunan di sektor pertanian, industri dan perdagangan untuk meningkatkan potensi sektor tersebut supaya dapat diandalkan menjadi sektor basis karena sudah didukung dengan jumlah tenaga kerja yang cukup banyak. Optimalisasi jumlah tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor ekonomi yang ada untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberi masukan terkait strategi optimalisasi jumlah tenaga kerja untuk meningkatkan PDRB dari suatu sektor ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almulaibari, H. (2011). Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal Tahun 2004-2008 [Skripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ayubi, A.A. (2014). Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1).
- Basuki, Y. (2020). Materi Analisis Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah/Kota, *Shift Share Analysis*, Analisis Kependudukan Dalam Perencanaan. Semarang: Universitas Diponegoro (tidak dipublikasikan).
- BPS. (2019). *Statistik Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019*. Mamuju: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju.
- BPS. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mamuju Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. Mamuju: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju.
- BPS. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Barat Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. Mamuju: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat.
- BPS. (2020). *Kabupaten Mamuju Dalam Angka 2020*. Mamuju: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju.
- Faturahman, B. M. (2017). Pemetaan Potensi Wilayah untuk Menunjang Kebijakan Pangan Kabupaten Pacitan. *Jispo*, 7(2), 43–62.
- Hartono, B. (2008). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah [Tesis]. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hidayati, S. R. (2015). Peran Kota Kecil Dalam Perkembangan Wilayah Pada Koridor Jalan Regional Semarang - Yogyakarta. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 11(4), 498. <https://doi.org/10.14710/pwk.v11i4.11602>
- Prishardoyo, B. (2008). Analisis tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Potensi ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Broto (PDDB) Kabupaten Pati tahun 2000 - 2005. *Jejak*, 1(1), 1–90.
- Khusaini, M. (2015). A Shift-share Analysis on Regional Competitiveness - A Case of Banyuwangi District, East Java, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 738–744. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.097>.
- Mangun, Nudiatulhuda. (2007). Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah [Tesis]. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pemerintah Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat*. Berita Negara RI Tahun 2004 No. 105. Sekretariat Negara. Jakarta.
- R. Jumiyanti, K. (2018). Analisis Location Quotient dalam Penentuan Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 1(1), 29. <https://doi.org/10.32662/golder.v1i1.112>.
- Sadono, Sukirno. (1994). Pengantar Ekonomi Makro. PT. Raja Grasindo Perseda: Jakarta